BAB II

GAMBARAN UMUM INSTANSI

2.1 Sejarah Singkat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Barat

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Barat yang dahulunya bernama Kantor Wilayah Departemen Perdagangan, telah mengalami beberapa perubahan dan perkembangan. Dari **tahun 1950 sampai dengan tahun 1955** Departemen Perdagangan pada mulanya bernama Inspeksi Organisasi Usaha Rakyat (IOUR) di bawah Kementrian Kemakmuran. Tujuan atau misinya adalah membina dan mengorganisasi usaha yang dipimpin oleh Bapak Hamdan dengan kantor yang beralamat di Jl. Asia Afrika No. 102 Bandung.

UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN

Dari **tahun 1953 sampai dengan tahun 1956** berubah nama menjadi Kantor Inspeksi Perekonomian Umum (KIPU) yang dipimpin oleh Bapak Mudigjo dengan alamat di Jl. Asia Afrika No. 102 Bandung. Misinya adalah membina dan membangun perekonomian di Jawa Barat di luar bidang pertanian, pertambangan, keuangan dan industrti koperasi.

Dari **tahun 1956 sampai dengan tahun 1958** ditandai dengan adanya perubahan pada nama Kementrian menjadi Kementrian Luar Negeri. Perubahan ini terjadi pada kantor di Tingkat Propinsi yaitu menjadi Kantor Inspeksi Perdagangan Dalam Negeri dan Perekonomian Umum (IPPU) dan misinya adalah dalam rangka membina Perdagangan Dalam Negeri di Jawa Barat.

Dari **tahun 1958 sampai dengan tahun 1965** masih dibawah Kementrian Perdagangan Dalam Negeri mengalami perubahan lagi yaitu menjadi Inspeksi

Perdagangan Dalam Negeri (IPDN) dan misinya bertambah luas diantaranya adalah menyelenggarakan perusahaan angkutan dan mengatur persediaan barang di Jawa Barat.

Dari **tahun 1956 sampai dengan tahun 1975** mengalami perubahan lagi menjadi Departemen Perdagangan. Akibatnya di Tingkat Propinsi namanya dirubah menjadi Perwakilan Departemen Perdagangan (PERWADEPDAG) dan di daerah Karesidennya menjadi Cabang Kantor Direktorat Pengadaan dan Penyaluran (CAPEN). Cabang ini terdapat di daerah Bogor, Banten, Purwakarta, Cirebon, dan Kabupaten Bandung. Atas prakarsa sebelumnya, kantor ini kemudian pindah alamat ke jalan Ir. H. Juanda No. 19 Bandung yang merupakan gedung tersendiri. Misi kantor pada masa itu adalah membina Perdagangan Luar Negeri, pelaksanaan PELITA I dibidang Perdagangan.

Dari **tahun 1976 sampai dengan tahun 1978** dengan tidak mengalami perubahan di Tingkat Pusat, di Tingkat Propinsi telah mengalami perubahan lagi menjadi Kantor Wilayah Departemen Perdagangan Propinsi Jawa Barat. Untuk Kantor Cabang Pengadaan dan Penyaluran yang berada di Karesidenan berubah menjadi Kantor Perdagangan (KANDAG), jumlah Kantor Perdagangan (KANDAG) pada waktu itu adalah sebanyak 13 buah.

Dari **tahun 1979 sampai dengan tahun 1983** untuk di Tingkat Kotamadya atau Kabupaten untuk perdagangan masih tetap Kantor Perdagangan, sedangakan untuk koperasi adalah Kantor Koperasi.

Pada awal **tahun 1981** terjadi penambahan kantor di Tingkat Kabupaten sebanyak 5 kantor perdagangan. Jadi jumlah kantor perdagangan di Jawa Barat menjadi 18 kantor. Pada bulan November 1981 terjadi lagi perubahan pimpinan

dari Bapak Goenardi kepada Bapak Endang Sutedja, B.B.A. yang memimpin sampai tahun 1986.

Dari **tahun 1983 sampai dengan tahun 1990** dengan adanya perubahan susunan pada PELITA IV, maka sejak tahun 1982 Koperasi mempunyai Departemen sendiri yang dipimpin sendiri oleh seorang Menteri. Sehingga pada tahun 1982 Koperasi terpisah dari Departemen Perdagangan. Selanjutnya sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Perdagangan No. 84/KP/1/83 tanggal 3 Februari 1983 dengan persetujuan Menteri Penerangan NO. 6-33/Menpen/I/83 telah disetujui dibukanya 6 kantor lagi, sehingga jumlah Kantor Departemen Perdagangan menjadi 24 kantor dan untuk Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dipimpin oleh Bapak H. M Machbub Hasni, S.H.

Dari **tahun 1990 sampai dengan tahun 1996** di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat terjadi pergantian pimpinan dari Bapak H. M. Machbub Hasni, SH kepada Bapak Drs. Bangun Sitompul, dan hari jadi Kantor Perdagangan Propinsi Jawa Barat jatuh pada tanggal 9 April dengan semboyan yang dikenal dengan ***"Niaga Karma Werdhi Nagara"*** yang artinya ***"Kemajuan Negara tergantung dari Perdagangan"***.

Sekitar **tahun 1994**, tepatnya pada tanggal 24 Januari terjadi pergantian Pimpinan dari Drs. Bangun Sitompul kepada Ir. Bambang Susilobroto, M.S.

Dari **tahun 1996 sampai dengan sekarang** berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perindustrrian dan Perdagangan No. 118/Mtahun 1996, Departemen Perdagangan dan Perindustrian dilebur menjadi satu dengan nama Departemen Perindustrian dan Perdagangan (DEPPERINDAG). Sedangkan untuk Propinsi Jawa Barat sendiri berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat No. 15

tahun 2000 tentang Dinas Daerah Propinsi Jawa Barat, Dinas Perindustrian dan Perdagangan berkedudukan sebagai pelaksana Pemerintah Propinsi Jawa Barat di Sekstor Industri dan Perdagangan. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Barat dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekertaris Daerah Propinsi Jawa Barat.

2.2 Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Barat

Keberadaan Struktur Organisasi sangat diperlukan terlebih untuk pihak Instansi Pemerintah seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Barat ini. Dengan adanya Struktur Organisasi maka kelangsungan kerja, pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing bagian yang ada dalam suatu organisasi baik itu para Pegawai ataupun para Kepala, baik itu Kepala Seksi, Kepala Sub Dinas, Kepala Dinas ataupun Pimpinan Proyek atau Kegiatan Dinas dapat terkoordinasikan dengan baik.

Bentuk Struktur Organisasi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Barat ini berbentuk fungsional. Bentuk Struktur Organisasi ini adalah sangat sederhana dan umum dipakai baik itu pada Instansi Swasta, Perusahaan ataupun Instansi Pemerintah, yang didalamnya terdapat garis komando serta garis koordinasi.

Setelah memiliki Struktur Organisasi, yang secara jelas sudah menunjukkan tugas dan tanggung jawab setiap pegawai, masih dibutuhkan pula pucuk pimpinan di dalam organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk

mengarahkan dan mengendalikan, agar dalam proses pencapaian tujuan dan segala pekerjaan Dinas dapat terlaksana dengan efisien.

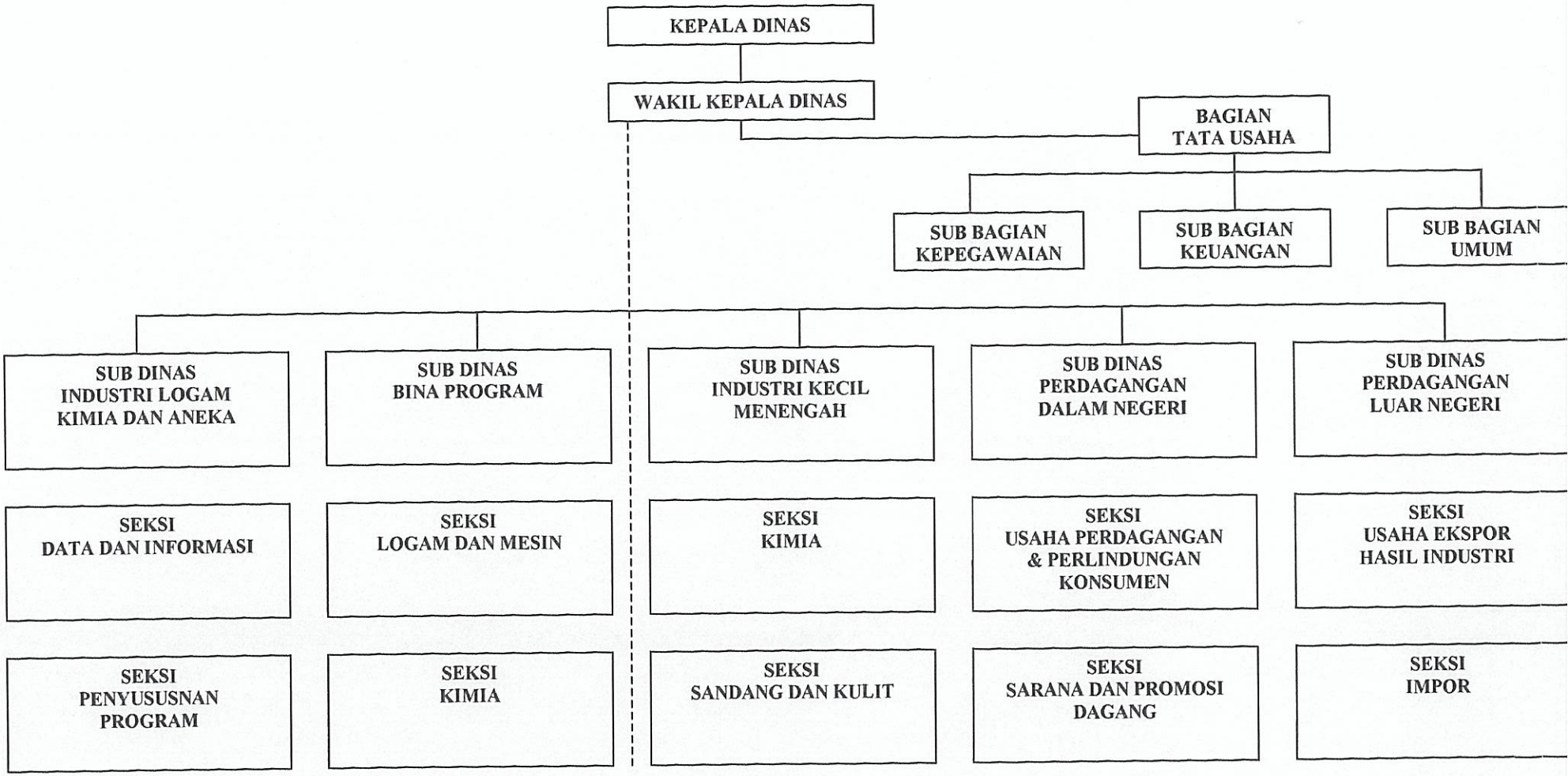
Secara garis besar Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Barat terdiri atas :

1. Kepala Dinas
2. Wakil Kepala Dinas
3. Bagian Tata Usaha
4. Sub Dinas Bina Program
5. Sub Dinas Industri Logam, Kimia, dan Aneka
6. Sub Dinas Industri Kecil dan Menengah
7. Sub Dinas Perdagangan Dalam Negeri
8. Sub Dinas Perdagangan Luar Negeri
9. Kelompok Jabatan Fungsional
10. Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengembangan Kemetrologian
11. Unit Pelayanan Teknis Daerah Balai Pengembangan Perindustrian

Untuk lebih memperjelas, berikut penulis sajikan Struktur Organisasi yang terdapat dan teraplikasikan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Barat :

(*Gambar ada di halaman selanjutnya*)

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROPINSI JAWA BARAT




SEKSI
EVALUASI & PELAPORAN
SEKSI
INDUSTRI TEKSTIL DAN
PRODUK TEKSTIL
SEKSI
LOGAM, MESIN DAN
ELEKTRONIKA
SEKSI
PERDAGANGAN DAN
PENYALURAN
SEKSI
EKSPOR HASIL
NON INDUSTRI
SEKSI
ANEKA INDUSTRI
SEKSI
KERAJINAN
SEKSI
PENDAFTARAN
PERUSAHAAN
SEKSI
PROMOSI & KERJASAMA
LUAR NEGERI
KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL
BALAI PENGELOLAAN
LABORATORIUM
KEMETROLOGIAN
BALAI
PENGEMBANGAN
PERINDUSTRIAN
SUB BAGIAN
TATA USAHA
BPLK
SUB BAGIAN
TATA USAHA
BAPERIN
SEKSI
MASSA & TIMBANGAN
SEKSI
PENGEMBANGAN
TEKNOLOGI
SEKSI
UKURAN ARUS,
PANJANG & VOLUME
SEKSI
PENGEMBANGAN
USAHA
SEKSI
UKUR ULANG & BDKT
SEKSI
PENGEMBANGAN
INFORMASI

2.3 Uraian Tugas di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Barat

Adapun untuk lebih jelasnya dari susunan organisasi diatas penulis akan menguraikan tugas dari setiap bidang tersebut diatas :

1. **Kepala Dinas**

   Memimpin, mengatur, membina, memotivasi dan mengendalikan tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Barat yang meliputi kegiatan industri logam, kimia dan aneka, industri kecil menegah, perdagangan dalam negeri dan perdagangan luar negeri serta kegiatan ketatausahaan.

2. **Wakil Kepala Dinas**

   Memimpin, merencanakan, membina, mengatur dan mengkoordinasikan serta mengendalikan tugas Wakil Kepala Dinas yang meliputi penyusunan Rencana Strategis, laporan Kerja, pelaksanaan evaluasi dan laporan serta Akuntabilitas Instansi Pemerintah.

3. **Bagian Tata Usaha**

   Memimpin, merencanakan, membina, mengatur dan mengkoordinasikan serta mengendalikan tugas Bagian Tata Usaha yang meliputi Urusan Kepegawaian, Keuangan dan Umum.

   - **Sub Bagian Kepegawaian**
     - Memimpin, merencanakan, mengatur dan mengawasi kegiatan Sub Bagian Kepegawaian yang meliputi pengelolaan administrasi kepegawaian, penyusunan dan dokumentasi peraturan perundang-undangan serta

kelembagaan dan ketatalaksanaan.

- **Sub Bagian Keuangan**
  - Memimpin, merencanakan, mengatur dan mengawasi kegiatan Sub Bagian Keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, pengelolaan anggaran serta pengadministrasiannya, termasuk pembinaan bendaharawan di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Barat.
- **Sub Bagian Umum**
  - Memimpin, merencanakan, mengatur dan mengawasi kegiatan Sub Bagian Umum yang meliputi urusan pengadministrasian, ketatausahaan, pengelolaan perlengkapan, kehumasan, perpustakaan dan kearsipan serta pelayanan kebuthan rumah tangga.

4. Sub Dinas Bina Program

Memimpin, merencanakan, membina, mengatur dan mengendalikan kegiatan Sub Dinas Bina Program yang meliputi kegiatan pendataan dan penyajian informasi, penyusunan program dan pelaksanaan evaluasi serta penyusunan laporan dinas.

- **Seksi Data dan Informasi**
  - Memimpin, merencanakan, membina, mengatur dan mengawasi kegiatan Seksi Data dan Informasi yang meliputi pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi serta pengelolaan sistem informasi

manajemen di bidang Perindustrian dan Perdagangan.

- **Seksi Penyusunan Program**
  - Memimpin, merencanakan, membina, mengatur dan mengawasi kegiatan Seksi Penyusunan Program yang meliputi penyusunan Visi, Misi, Rencana Strategis serta rencana tahunan Dinas, menyusun rencana serta program kerja unit dilingkungan Dinas.
- **Seksi Evaluasi dan Pelaporan**
  - Memimpin, merencanakan, membina, mengatur dan mengendalikan kegiatan Seksi Evaluasi dan Pelaporan yang meliputi pengumpulan dan pengelolaan data, penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja Dinas.

5. Sub Dinas Industri Logam, Kimia dan Aneka (ILKA)

Memimpin, merencanakan, membina, mengatur dan mengendalikan kegiatan Sub Dinas ILKA yang meliputi kegiatan pengembangan usaha logam dan mesin, kimia, industri tekstil, produk tekstil dan aneka industri.

- **Seksi Logam dan Mesin**
  - Memimpin, merencanakan, membina, mengatur dan mengawasi kegiatan Seksi Logam dan Mesin yang meliputi pengumpulan dan pengolahan data serta menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan teknis dan fasilitas di bidang pengembangan industri logam dan mesin.

- **Seksi Kimia**
  - Memimpin, merencanakan, membina, mengatur dan mengendalikan kegiatan Sub Dinas ILKA yang meliputi kegiatan pengembangan usaha logam dan mesin, industri tekstil, produk tekstil dan aneka industri.
- **Seksi Industri Tekstil dan Produk Tekstil**
  - Memimpin, merencanakan, membina, mengatur dan mengawasi kegiatan Seksi Industri Tekstil dan Produk Tekstil yang meliputi pengumpulan dan pengolahan data serta menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan teknis dan fasilitas dibidang pengembangan usaha Industri Tekstil dan Produk Tekstil.
- **Seksi Aneka Industri**
  - Memimpin, merencanakan, membina, mengatur dan mengawasi kegiatan Seksi Aneka Industri yang meliputi pengumpulan dan pengolahan data serta menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan teknis dan fasilitas dibidang pengembangan usaha Aneka Industri.

6. Sub Dinas Industri Kecil Menengah

Memimpin, merencanakan, membina, mengatur dan mengendalikan kegiatan Sub Dinas Industri Kecil Menengah yang meliputi kegiatan penyelenggaraan pengembangan Usaha Kimia, Sandang dan Kulit, Logam, Mesin dan Elektronika serta Kerajinan.

- **Seksi Kimia**
  - Memimpin, merencanakan, membina, mengatur dan mengawasi kegiatan Seksi Kimia yang meliputi pengumpulan dan pengolahan data serta menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan teknis dan fasilitas dibidang pengembangan usaha Industri Kecil Menengah Kimia.
- **Seksi Sandang dan Kulit**
  - Memimpin, merencanakan, membina, mengatur dan mengawasi kegiatan Seksi Sandang dan Kulit yang meliputi pengumpulan dan pengolahan data serta menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan teknis dan fasilitas dibidang pengembangan sarana, usaha dan produksi Sandang dan Kulit.
- **Seksi Logam, Mesin dan Elektronika**
  - Memimpin, merencanakan, membina, mengatur dan mengawasi kegiatan Seksi Logam, Mesin dan Elektronika yang meliputi pengumpulan dan pengolahan data serta menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan teknis dan fasilitas dibidang pengembangan sarana, usaha dan produksi Logam, Mesin dan Elektronika.

➢ **Seksi Kerajinan**

- Memimpin, merencanakan, membina, mengatur dan mengawasi kegiatan Seksi Kerajinan dan Umum yang meliputi pengumpulan dan pengolahan data serta menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan teknis dan fasilitas dibidang pengembangan usaha, sarana dan produksi.

UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN UNIKOM

7. Sub Dinas Perdagangan Dalam Negeri

Memimpin, merencanakan, membina, mengatur dan mengendalikan kegiatan Sub Dinas Perdagangan Dalam Negeri yang meliputi kegiatan penyelenggaraan pengembangan usaha perdagangan dan perlindungan konsumen, pengadaan dan penyaluran, pendaftaran serta sarana dan promosi dagang.

➢ **Seksi Usaha Perdagangan dan Perlindungan Konsumen**

- Memimpin, merencanakan, mengatur dan mengawasi kegiatan Seksi Usaha Perdagangan dan Perlindungan Konsumen yang meliputi pengumpulan dan pengolahan data serta menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan teknis dan fasilitas dibidang pengembangan usaha perdagangan serta deseminasi, sosialisasi dengan dunia usaha dan masyarakat dalam rangka perlindungan konsumen.

- **Seksi Pengadaan dan Penyaluran**
  - Memimpin, merencanakan, mengatur dan mengawasi kegiatan Seksi Pengadaan dan Penyaluran yang meliputi pengumpulan dan pengolahan data serta menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan teknis dan fasilitas dibidang Pengadaan dan Penyaluran barang dan jasa serta hubungan kerjasama dengan dunia usaha.
- **Seksi Pendaftaran Perusahaan**
  - Memimpin, merencanakan, mengatur dan mengawasi kegiatan Seksi Pendaftaran Perusahaan yang meliputi pengumpulan dan pengolahan data serta menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan teknis dan fasilitas dibidang pendaftaran perusahaan, pengendalian pendaftaran perusahaan serta penyajian buku daftar perusahaan.
- **Seksi Sarana dan Promosi Dagang**
  - Memimpin, merencanakan, mengatur dan mengawasi kegiatan Seksi Sarana dan Promosi Dagang yang meliputi pengumpulan dan pengolahan data serta menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan teknis dan fasilitas dibidang sarana dan promosi dagang.

8. Sub Dinas Perdagangan Luar Negeri

Memimpin, merencanakan, membina, mengatur dan mengendalikan kegiatan Sub Dinas Perdagangan Luar Negeri yang meliputi kegiatan ekspor hasil industri dan hasil non industri, impor serta promosi dan kerjasama luar negeri.

- **Seksi Ekspor Hasil Industri**
  - Memimpin, merencanakan, mengatur dan mengawasi kegiatan Seksi Ekspor Hasil Industri yang meliputi pengumpulan dan pengolahan data serta menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan teknis dan fasilitas dibidang pengembangan sarana ekspor hasil industri, iklim usaha dan sistem informasi ekspor hasil industri.
- **Seksi Ekspor Non Industri**
  - Memimpin, merencanakan, mengatur dan mengawasi kegiatan Seksi Ekspor Non Industri yang meliputi pengumpulan dan pengolahan data serta menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan teknis dan fasilitas dibidang pengembangan sarana ekspor non industri, iklim usaha dan sistem informasi ekspor non industri.
- **Seksi Impor**
  - Memimpin, merencanakan, mengatur dan mengawasi kegiatan Seksi Impor yang meliputi pengumpulan dan pengolahan data serta menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan teknis dan fasilitas dibidang

pengembangan dan pengendalian kebijakan impor.

- **Seksi Promosi dan Kerjasama Luar Negeri**
  - Memimpin, merencanakan, mengatur dan mengawasi kegiatan Seksi Promosi dan Kerjasama Luar Negeri yang meliputi pengumpulan dan pengolahan data serta menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan teknis dan fasilitas dibidang promosi dan kerjasama luar negeri.

9. Kelompok Jabatan Fungsional

Melaksanakan persiapan penyuluhan, melaksanakan penyuluhan industri dan perdagangan serta melaksanakan evaluasi penyuluhan.

10. Balai Pengelolaan Laboratorium Kemetrologian

Memimpin, Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan dibidang pengelolaan Laboratorium Kemetrologian.

- **Sub Bagian Tata Usaha**
  - Melaksanakan penyusunan rencana kerja, pengelolaan administrasi, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, umum dan pelaporan.
- **Seksi Massa dan Timbangan**
  - Penyiapan bahan, pengelolaan, pemeriksaan, pengujian, kalibrasi, verifikasi standar kerja, menera dan menera ulang ukuran massa dan timbangan.

- **Seksi Ukuran Arus, Panjang dan Volume**
    - Penyiapan bahan, pengelolaan, pemeriksaan, pengujian, kalibrasi, verifikasi standar kerja, menera dan menera ulang ukuran arus, panjang dan volume.
- **Seksi Ukur Ulang dan Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT)**
    - Melaksanakan kegiatan penyiapan bahan ukur ulang, penyuluhan penggunaan UTTP dan BDKT, pembebasan tera ulang serta pengujian BDKT.

10. Balai Pengembangan Perindustrian

Memimpin, mengkoordinasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dibidang Pengembangan Perindustrian.

- **Sub Bagian Tata Usaha**
    - Melaksanakan penyusunan rencana kerja, pengelolaan administrasi, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, umum, perencanaan dan pelaporan.
- **Seksi Pengembangan Teknologi**
    - Menyusun bahan kajian dan implementasi teknologi tepat guna, perencanaan pengembangan dan rekayasa industri kecil dan menengah, pelaksanaan pelayanan teknis.

- **Seksi Pengembangan Usaha**
  - Menyusun bahan perencanaan dan pengembangan usaha industri kecil dan menengah serta pelayanan kelayakan usaha.
- **Seksi Pengembangan Informasi**
  - Penyusunan bahan pelaksanaan sistem informasi industri kecil dan menengah di sentra-sentra industri.

2.4 Aspek Kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Barat

2.4.1. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Barat

2.4.1.1 Kedudukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Barat

Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) Propinsi Jawa Barat adalah Instansi Vertikal yang berkedudukan di Propinsi atau Daerah Tingkat I. Dinas Perindustrian dan Perdagangan ini dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Gubernur Daerah Tingkat I Jawa Barat, dan secara administratif berada di bawah Sekertaris Daerah Tingkat I jawa Barat.

Secara fisik kedudukan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Barat ini terletak di Jl. Asia Afrika No. 146 Bandung yang merupakan pusat dari kantor secara operasional dan juga di Jl. Ir. H. Juanda No. 19 Bandung.

2.4.1.2 Tugas Pokok Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Barat

Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi pemerintahan umum dan tugas pembangunan Propinsi Jawa Barat berdasarkan kewenangan desentralisasi dan dekonsentralisasi dan tugas pembantuan bidang industri dan perdagangan.

2.4.1.3 Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Barat

Adapun fungsi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah sebagai berikut :

1. Singkronisasi rencana dan program regional pembangunan industri dan perdagangan atas dasar keterpaduan kebijaksanaan bersama.
2. Penyusunan kebijaksanaan teknis di sektor industri dan perdagangan.
3. Pemberian pelayanan pemerintahan dan pelaksanaan pelayanan umum lintas Kab./Kota di sektor industri dan perdagangan.
4. memfasilitasi, koordinasi dan kerjasama antar instansi pemerintah, dunia usaha, asosiasi usaha, asosiasi profesi dan lembaga pembinaan lainnya.
5. pembinaan teknis di sektor industri dan perdagangan lintas Kab./Kota.
6. Pembinaan unit pelayanan teknis dinas.
7. Pengembangan sistem informasi.
8. Pelaksanaan kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan industri dan perdagangan disesuaikan dengan perkembangan daerah/wilayah yang bersangkutan secara perijinan.
9. Pelaksanaan kegiatan program sektor industri dan perdagangan, industri

aneka, industri logam, mesin dan kimia, usaha perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri dan kemetrologian.

10. Konsultasi dengan pemerintah daerah dan melaksanakan hubungan kerja dengan instansi vertikal lainnya secara organisasi atau asosiasi dunia usaha di wilayah yang bersangkutan.
11. Pengawasan mutu dan pemantauan penerapan standar sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
12. Bimbingan dalam usaha perbaikan dan peningkatan mutu barang dan jasa dalam rangka pemasaran dalam negeri dan ekspor.
13. Pengawasan dan pengendalian teknis terhadap pelaksanaan kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan industri dan perdagangan.
14. Pelaksanaan urusan tata usaha dinas.

UNIT PERPUSTAKAAN TEKNIS UNIKOM

2.4.2 Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Barat

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Barat wajib menerapkan koordinasi intergrasi dan penyamaan Visi, Misi dan Tujuan baik dalam lingkungan Dinas maupun dengan Instansi Vertikal Dinas lainnya dan antar unsur Dinas di Wilayah serta dengan semua unsur Pemerintah Daerah setempat.

Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Barat bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan, pedoman serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk, dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya secara berkala maupun sewaktu-waktu.

Setiap laporan diterima oleh pemimpin satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dalam rangka memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan disampaikan pula kepada satuan organisasi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pemimpin unit organisasi dibantu oleh pimpinan unit-unit organisasi bawahannya, dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing mengadakan rapat berkala.

Apabila seorang pemimpin satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Barat berhalangan melaksanakan tugas, maka yang bersangkutan dapat menunjuk satu orang pejabat satu tingkat lebih rendah dibawahnya yang bertindak untuk dan atas nama pimpinan satuan organisasi yang bersangkutan.


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM